

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan perekonomian di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Pelimpahan kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom adalah desentralisasi. Menurut Maimunah (2006), otonomi daerah adalah suatu hak dan tanggung jawab, juga kewajiban daerah

otonom agar dapat menyusun dan mengurus urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurut Sasana (2012), pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu : (a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah dapat melakukan pemerataan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Perkembangan ekonomi daerah adalah menekankan pada tingkat variabilitas pertumbuhan ekonomi antar daerah. Disparitas pertumbuhan antar sektor di masing-masing daerah, termasuk dalam pola berimbang, distribusi pendapatan yang biasa diukur berdasarkan Bank Dunia dan *Gini Index* yaitu pertumbuhan ekonomi dilihat dari potensi APBD bagian Pendapatan Asli Daerah (Soebagiyo, 2013).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha daerah akan menghadapi perubahan besar yang akan berpengaruh terhadap iklim persaingan usaha di daerah. Salah satu hal yang perlu diketahui bahwa perubahan itu akan membawa kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan di daerah tersebut secara mandiri (Soebagiyo, 2013). Tentunya kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah dan sumbangan yang tinggi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Skala prioritas pembangunan, apabila menurut pertimbangan prioritas bagi daerah maka skala prioritasnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (a) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, (b) tingkat pertumbuhan ekonomi, (c) Potensi APBD, (d) Kecenderungan transisi sektoral, berdasarkan kontribusi, nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja, (e) tingkat pengangguran, (f) persiapan tinggal landas masing-masing daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia mengisyaratkan pengakuan bahwa otonomi, harus didukung dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang proporsional, berkeadilan, dan berimbang. Pembangunan daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan luas dan mengelola kegiatan pembangunan daerahnya masing-masing (Soebagiyo, 2013). Dalam rangka menyediakan pelayanan publik maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran atau belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja yang dikeluarkan masing-masing daerah jumlahnya berbeda karena setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena yang sedang dihadapi pemerintahan Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya (kontribusi) pendapatan asli daerah di dalam struktur APBD. Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Belanja atau pengeluaran dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang pembiayaannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja tidak langsung adalah belanja yang pendanaanya tidak dipengaruhi secara langsung adanya suatu program atau kegiatan.

Dalam 2 jenis belanja tersebut dapat diklasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian, yaitu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pelaksanaan belanja daerah harus digunakan sesuai target dan anggaran yang ditetapkan. Belanja daerah diutamakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan.

Tabel I-1
Rata-Rata Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018

No	Daerah	Rata-Rata (dalam rupiah)	No	Daerah	Rata-Rata
1	Bangkalan	1,712,000,796,889	20	Pasuruan	3,133,517,044,466
2	Banyuwangi	2,701,309,762,351	21	Ponorogo	2,173,955,125,582
3	Blitar	2,156,163,367,826	22	Probolinggo	2,048,372,605,569
4	Bojonegoro	2,981,690,540,744	23	Sampang	1,618,017,041,266
5	Bondowoso	1,895,366,581,366	24	Sidoarjo	3,560,618,406,126
6	Gresik	2,608,769,817,355	25	Situbondo	1,508,025,951,506
7	Jember	3,270,146,025,503	26	Sumenep	2,049,034,875,512
8	Jombang	2,274,875,406,018	27	Trenggalek	1,676,414,616,655
9	Kediri	2,679,112,916,994	28	Tuban	2,277,249,225,785
10	Lamongan	2,751,652,968,909	29	Tulungagung	2,491,477,702,353
11	Lumajang	1,840,658,566,320	30	Kota Kediri	1,096,712,498,677
12	Madiun	1,683,346,004,525	31	Kota Blitar	806,298,417,292
13	Magetan	1,674,988,228,049	32	Kota Malang Kota	1,773,799,291,481
14	Malang	3,428,941,849,485	33	Probolinggo	872,409,665,078
15	Mojokerto	2,170,033,152,604	34	Kota Pasuruan	790,768,922,230
16	Nganjuk	2,175,606,681,312	35	Kota Mojokerto	818,029,407,232
17	Ngawi	1,972,543,691,350	36	Kota Madiun	981,523,046,623
18	Pacitan	1,531,325,170,447	37	Kota Surabaya	7,720,810,203,346
19	Pamekasan	1,794,914,493,233	38	Kota Batu	807,469,533,343

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan Tabel I-1 menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2016 sampai 2018 belanja daerah Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan karena Kota Surabaya merupakan *capital city* di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, daerah dengan belanja terendah selama periode 2016 sampai 2018 adalah Kota Pasuruan.

Namun, apabila kita bandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh hal ini belum cukup sebagai realisasi program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Masalah perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah masalah pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya.

Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih ada yang hidup dalam kemiskinan dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Tingginya kemiskinan jika tidak teratasi akan menimbulkan meningkatnya penduduk miskin selalu meningkat setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan apabila kemiskinan semakin banyak adalah rendahnya pendidikan dan tingginya kriminalitas (Yustie & Heriqbaldi, 2014).

Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk pembangunan sektor publik, memiliki tujuan untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan sehingga mengurangi menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta dan mengusahakan agar

alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peningkatan kebijakan alokasi belanja daerah dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2018 ?
4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018.

2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018.
4. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi masyarakat, sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang keuangan daerah dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan analisis panel data. Analisis panel data adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan data antar individu (*cross section*). Regresi dengan menggunakan data panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*, diantaranya:

1. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja.
2. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam kesimpulan perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

$$BD = f(PVR, POP, PDRB, IPM)^1$$

Secara umum bentuk utama regresinya adalah :

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 JP_{it} - \beta_2 PVR_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BD	= Belanja daerah
PVR	= Kemiskinan
POP	= Laju Pertumbuhan Penduduk
PDRB	= Pendapatan Domestik Regional Bruto
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
β_0	= Intersep
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien regresi variabel independen
ε	= Komponen error

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹ Modifikasi model dari Sanusi dan Yusuf (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015: Pendekatan *Panel Regression*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.3 No. 1 ISSN: 2527-2772.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori mengenai variabel yang digunakan. Teori tersebut mencakup Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin, Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Daerah . Dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis atas permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, metode analisis data seta estimasi model regresi dengan panel data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian tentang objek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penulis juga melakukan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.